

SKRIPSI

DETERMINAN TINGKAT PENGANGGURAN

(Studi Kasus 5 Negara ASEAN Tahun 1998-2022)

RATNA LUNDINI



DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2024



SKRIPSI

DETERMINAN TINGKAT PENGANGGURAN (Studi Kasus 5 Negara ASEAN Tahun 1998-2022)

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi

RATNA LUNDINI

A011201013



DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2024



SKRIPSI

DETERMINAN TINGKAT PENGANGGURAN (Studi Kasus 5 Negara ASEAN Tahun 1998-2022)

disusun dan diajukan oleh :

RATNA LUNDINI
A011201013

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Makassar, 20 Agustus 2024

Pembimbing I

Dr. Retno Fitrianti, S.E., M.Si., CWM®
NIP. 197709 13 200212 2 002

Pembimbing II

Dr. Munawwarah S. Mubarak, S.E., M.Si
NIP. 198711 09 201404 2 001

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sabir SE., M.Si., CWM®
NIP. 19740715 200212 1 003



SKRIPSI
DETERMINAN TINGKAT PENGANGGURAN
(Studi Kasus 5 Negara ASEAN Tahun 1998-2022)

disusun dan diajukan oleh :

RATNA LUNDINI
A011201013

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal, 20 Agustus 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Panitian Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Retno Fitrianti, S.E., M.Si. CWM®	Ketua	1..... 
2.	Dr. Munawwarah S. Mubarak, S.E., M.Si	Sekretaris	2..... 
3.	Prof. Dr. Nursini, S.E., MA.	Anggota	3..... 
4.	Salman Samir, S.E., M.Sc	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Hasanuddin



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : RATNA LUNDINI
Nomor Pokok : A011201013
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul ***Determinan Tingkat Pengangguran (Studi Kasus 6 Negara ASEAN Tahun 1998-2022)*** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 20 Agustus 2024

Yang Menyatakan


Ratna Lundini

A011201013



PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“DETERMINAN TINGKAT PENGANGGURAN (Studi Kasus 5 Negara ASEAN Tahun 1998-2022)”** dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini bukan hanya sebagai syarat pemenuhan untuk menyelesaikan studi serta untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, akan tetapi penulis berangkat dari masalah pengangguran yang terjadi hampir di setiap negara baik itu negara berkembang maupun negara yang sudah maju terkhususnya di ASEAN, yang kemudian dituangkan dalam sebuah karya penelitian dalam bentuk skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan skripsi ini Penulis dengan senang hati menerima setiap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang terkait dengan tulisan ini agar memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi setiap yang membaca atau bahkan bagi masyarakat luas. Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada mereka secara khusus sebagai berikut:

1. Allah SWT atas kehendak serta rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.

Orang tua Penulis, Ayahanda tercinta Harsan dan Ibunda Alm. Nurlina yang telah memotivasi dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan



yang tak ternilai dengan doa-doa yang tak henti dipanjatkan untuk anaknya.

3. Orang tua wali penulis, kakek tercinta Lamiri dan Nenek tercinta Suriani yang dalam kesederhanaan berhasil menjadi orang tua terbaik yang selalu sabar dalam mendidik, memotivasi dan penuh cinta yang tak terhingga. Terimakasih atas segala doa, motivasi, dan dukungan kepada penulis.
4. Nurlinda ST, nurlisa ST, dan Abdul Malik, yang selalu memberikan dukungan baik dalam bentuk materil maupun non materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM® selaku ketua Departemen Ilmu Ekonomi dan Ibu Fitriwati Djam'an, SE.,MA selaku sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi. Terima kasih atas segala bantuan yang senantiasa diberikan kepada penulis
6. Ibu Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si., CWM® selaku dosen pembimbing I sekaligus dosen penasihat penulis dan Ibu Dr. Munawwarah S. Mubarak, SE., M.Si selaku dosen pembimbing II. Terimakasih atas segala ilmu, motivasi, arahan, dan bimbingan serta kesabaran yang telah diberikan kepada Penulis sehingga bisa menyelesaikan karya ini.
7. Prof. Dr. Nursini, SE., MA., selaku dosen penguji I dan Bapak Salman Samir, SE., M.Sc selaku dosen penguji II, terima kasih untuk kritik dan saran yang mebangun yang disampaikan pada saat ujian seminar proposal dan ujian skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan baik dan dari hal tersebut Penulis mendapat pengetahuan-pengetahuan baru.



8. Seluruh dosen FEB-UH yang telah memberikan pengetahuan, arahan, bimbingan, dan nasehat kepada Penulis selama menjadi mahasiswa di Universitas Hasanuddin, serta kepada seluruh jajaran akademisi yang telah banyak membantu dalam administrasi akademi Penulis.
9. Teman-teman Drama Club, April, Hikmah, Nuzul, Apel yang telah membantu dan menemani penulis dalam berproses selama masa perkuliahan.
10. Teman-teman Rivendell yang selalu menjadi teman berbagi kebersamaan dan bantuan selama perkuliahan, tekhusus, Wahida, Eda, Ila, Helmi, Epa, Aulia, serta teman-teman lainnya yang belum tertulis.
11. Teman-teman KKN 110 Desa Bonto Manurung, Herlia, Niar, Vira, Fitri, Syifa, dan Ikbal terima kasih telah menjadi teman-teman yang sabar dan penuh cinta kasih selama berada di lokasi KKN.
12. Keluarga besar HIMAJIE FEB-UH terima kasih untuk momen-momen berharga, kesempatan belajar serta pengalaman berkesan dalam Rumah Merah HIMAJIE.
13. Kabinet Membara terima kasih telah memberikan kesempatan untuk belajar dan berproses dalam organisasi, serta terima kasih untuk segala pengalaman berharga dan kekompakan selama kepengurusan.
14. Untuk Rismayanti, sahabat Penulis dari kecil hingga saat ini, dan untuk masa yang akan datang terima kasih atas segala bantuan, doa, dukungan, dan semangat yang diberikan. Semoga kita bisa mewujudkan impian-impian yang pernah kita rencanakan yah.



15. Tekhusus kepada Park Chanyeol yang jauh disana, terima kasih untuk motivasi dan semangat terhadap Penulis untuk menyelesaikan karya ini dan agar tetap bertahan di dunia ini, *soon* yah kita pasti bertemu.
16. Untuk Penulis, Ratna Lundini terima kasih untuk tetap bertahan sampai saat ini, terima kasih karena telah menyelesaikan karya ini. Tetap bertahan yah dan jangan lupakan Allah SWT.

Makassar, 21 Agustus 2024



Ratna Lundini



ABSTRAK

DETERMINAN TINGKAT PENGANGGURAN (Studi Kasus 5 Negara ASEAN Tahun 1998-2022)

Ratna Lundini

Retno Fitrianti

Munawwarah S. Mubarak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah, *Foreign Direct Investment* (FDI), Inflasi, dan Jumlah Penduduk terhadap Pengangguran di ASEAN. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan jenis data panel yang terdiri dari 5 negara ASEAN selama periode tahun 1998-2022, data tersebut diperoleh dari *World Bank*, *Internasional Monetary Fund* (IMF), dan *country economy*. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dan berdasarkan uji Hausman model terbaik yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Pengangguran, variabel FDI tidak berpengaruh terhadap Pengangguran, variabel Inflasi tidak berpengaruh terhadap Pengangguran, dan variabel Jumlah Penduduk berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pengangguran.

Kata Kunci: Pengangguran, Pengeluaran Pemerintah, FDI, Inflasi, Jumlah Penduduk



ABSTRACT

DETERMINANTS OF UNEMPLOYMENT RATE (Case Study of 5 ASEAN Countries 1998-2022)

Ratna Lundini

Retno Fitrianti

Munawwarah S. Mubarak

This study aims to determine the effect of Government Expenditure, Foreign Direct Investment (FDI), Inflation, and Population on Unemployment in ASEAN. The data used in this study is secondary data with the type of panel data consisting of 5 ASEAN countries during the period 1998-2022, the data is obtained from the World Bank, the International Monetary Fund (IMF), and country economy. The analysis method used in this study is panel data regression and based on the Hausman test the best model used is the Fixed Effect Model (FEM). The result shows that Government Expenditure variable has a negative and significant effect on Unemployment, FDI variable has no effect on Unemployment, Inflation variable has no effect on Unemployment, and Population variable has a positive and significant effect on Unemployment.

Keywords: Unemployment, Government Expenditure, FDI, Inflation, Total Population



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Tinjauan Teoritis.....	16
2.1.1 Pengangguran.....	16
2.1.2 Pengeluaran Pemerintah.....	18
2.1.3 <i>Foreign Direct Investment</i> (FDI).....	21
2.1.4 Inflasi.....	22
2.1.5 Jumlah Penduduk.....	25
2.2 Hubungan Antar Variabel.....	26
2.2.1 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Pengangguran.....	26
2.2.2 Hubungan <i>Foreign Direct Investment</i> dengan Pengangguran.....	27
2.2.3 Hubungan Inflasi dengan Pengangguran.....	28
2.2.4 Hubungan Jumlah Penduduk dengan Pengangguran.....	29
2.3 Tinjauan Empiris.....	29
2.4 Kerangka Konseptual.....	32
2.5 Hipotesis Penelitian.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	36
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	36
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	36



3.4	Metode Analisis Data	37
3.4.1	Regresi Data Panel	37
3.4.2	Uji Hipotesis	40
3.4.3	Uji Asumsi Klasik	42
3.5	Definisi Operasional Variabel	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		46
4.1	Gambaran Umum Wilayah Penelitian	46
4.1.1	Gambaran Umum ASEAN	46
4.2	Perkembangan Variabel Penelitian	47
4.2.1	Perkembangan Tingkat Pengangguran ASEAN	47
4.2.2	Perkembangan Pengeluaran Pemerintah ASEAN	50
4.2.3	Perkembangan <i>Foreign Direct Investment</i> (FDI) ASEAN	52
4.2.4	Perkembangan Tingkat Inflasi ASEAN	54
4.2.5	Perkembangan Jumlah Penduduk di ASEAN	56
4.3	Analisis Data	60
4.3.1	Pengujian Model Regresi Data	60
4.4	Uji Hipotesis	63
4.4.1	Uji t (Uji Parsial)	63
4.4.2	Uji F (Uji Serentak)	66
4.4.3	Uji Determinasi (R^2)	66
4.5	Uji Asumsi Klasik	58
4.5.1	Uji Multikolinearitas	58
4.5.2	Uji Heteroskedastisitas	59
4.6	Pembahasan Hasil Estimasi	67
4.6.1	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pengangguran	67
4.6.2	Pengaruh FDI Terhadap Pengangguran	70
4.6.3	Pengaruh Inflasi terhadap Pengangguran	72
4.6.4	Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pengangguran	73
BAB V PENUTUP		77
	Simpulan	77
	ran	78
	PUSTAKA	80





DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. 1 Tingkat Pengangguran di Negara-Negara ASEAN Tahun 2013-2022 (persen)	3
Tabel 1. 2 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah di Negara-Negara ASEAN Tahun 2013-2022 (juta US\$).....	4
Tabel 1. 3 Perkembangan Foreign Direct Investment Tahun 2013-2022 (miliar US\$)	8
Tabel 1. 4 Inflasi di Negara ASEAN Tahun 2013-2022 (persen).....	10
Tabel 1. 5 Jumlah Penduduk di Negara-Negara ASEAN Tahun 2013-2022 (juta jiwa)	12
Tabel 4. 1 Rincian Tingkat Pengangguran di Negara-Negara ASEAN	49
Tabel 4. 2 Rincian Pengeluaran Pemerintah di Negara-Negara ASEAN.....	51
Tabel 4. 3 Perkembangan Foreign Direct Investment (FDI) di Negara-Negara ASEAN Tahun 1998-2022.....	53
Tabel 4. 4 Rincian Tingkat Inflasi di Negara-Negara ASEAN Tahun 1998-2022 .	55
Tabel 4. 5 Rincian Jumlah Penduduk di Negara-Negara ASEAN.....	57
Tabel 4. 6 Hasil uji Multikolinearitas (Correlationn)	58
Tabel 4. 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas	59
Tabel 4. 8 Interpretasi Uji Heteroskedastisitas	60
Tabel 4. 9 Hasil Uji Chow	61
Tabel 4. 10 Hasil Uji Hausman.....	62
Tabel 4. 11 Uji t.....	63
Tabel 4. 12 Uji F	66
Tabel 4. 13 Koefisien Determinasi (R ²).....	66



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Penelitian	34
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengangguran yang terus-menerus mengalami peningkatan merupakan ancaman langsung terhadap stabilitas ekonomi dan sosial suatu negara yang pada gilirannya menghambat pembangunan sumber daya manusia dan perekonomiannya. Literatur ekonomi memberikan bukti kuat bahwa pengangguran meningkatkan risiko kemiskinan dan berkontribusi terhadap kesenjangan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengurangi tingkat pengangguran dan memitigasi dampaknya melalui kebijakan fiskal yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan, stabilitas harga, dan mengurangi pengangguran. Namun, pada kenyataannya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah belum mampu menekan angka pengangguran yang terjadi.

Secara umum pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Pengangguran adalah salah satu masalah ekonomi serius yang mempengaruhi ekonomi sebagian besar negara sebagai akibat dari kurangnya investasi optimal pada komponen tenaga kerja manusia, dan akibatnya hilangnya produksi, yang berdampak negatif pada kesejahteraan individu dan masyarakat. Pengangguran memiliki dampak psikologis dan sosial yang memengaruhi kondisi psikologis para penganggur (Hammad et al., 2023a).

guran merupakan lahan subur dan penyebab langsung dari berbagai dan penyakit sosial yang serius. Akibat yang paling serius dari hal itu endahnya standar hidup dan meluasnya kemiskinan. Karena penderitaan



akibat penyakit pengangguran selalu disertai dengan gejala-gejala yang tidak diinginkan, antara lain kurangnya pendapatan, serta ketidakadilan yang dirasakan oleh para penganggur baik dalam distribusi pendapatan maupun kekayaan. Dengan demikian, dampak pengangguran tidak terbatas pada individu yang menganggur, tetapi meluas ke seluruh lapisan masyarakat.

Selama bertahun-tahun, pengangguran telah meningkat secara substansial di seluruh dunia, yang mencerminkan pelemahan dalam kegiatan ekonomi global. Pengangguran berdampak negatif pada kemampuan pemerintah untuk menghasilkan pendapatan dan juga cenderung mengurangi aktivitas ekonomi. Tingkat pengangguran yang tinggi yang saat ini dialami oleh banyak negara, mencerminkan kondisi siklus dan kelemahan yang mengakar dalam institusi pasar tenaga kerja dan program-program pengeluaran pemerintah.

Pengangguran memiliki biaya finansial yang jelas, tetapi tidak ada jumlah uang yang benar-benar dapat menangkap biaya psikologis dan manusia dari pengangguran (Samuelson, 2008). Di Mesir, Pemerintah negara berupaya mengurangi tingkat pengangguran dan memitigasi dampaknya melalui kebijakan fiskal yang diperlukan untuk mencapai keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan pengurangan pengangguran (Abouelfarag & Qutb, 2021) Berikut disajikan data persentase tingkat pengangguran di ASEAN selama 10 tahun terakhir yakni tahun 2013 sampai tahun 2022:

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), adalah suatu perhimpunan negara di wilayah Asia Tenggara yang mayoritas terdiri dari negara

yang berkembang. Anggota negara ASEAN yang tergabung dalam ASEAN Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia,



Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Berikut tingkat pengangguran di negara ASEAN dalam 10 tahun terakhir:

**Tabel 1. 1 Tingkat Pengangguran di Negara-Negara ASEAN
Tahun 2013-2022 (persen)**

Tahun	BN	KH	ID	Lao	MY	MM	PH	SG	TH	VN
2013	6,8	0,4	4,3	1,8	3,2	0,8	3,5	3,9	0,3	1,3
2014	6,9	0,7	4	2,1	2,9	0,8	3,6	3,7	0,6	1,3
2015	7,7	0,4	4,5	2,5	3,1	0,8	3,1	3,8	0,6	1,9
2016	8,5	0,7	4,3	2,9	3,4	1	2,7	4,1	0,7	1,9
2017	9,3	0,1	3,8	3,3	3,4	1,4	2,5	4,2	0,8	1,9
2018	8,7	0,1	4,4	3,3	3,3	0,8	2,3	3,6	0,8	1,2
2019	6,6	0,1	3,6	3,4	3,3	0,4	2,2	3,1	0,7	1,7
2020	7,4	0,2	4,2	3,9	4,5	1,5	2,5	4,1	1,1	2,1
2021	4,9	0,4	3,8	4,2	4,1	4,3	3,4	4,6	1,2	2,4
2022	4,5	0,2	3,5	3,8	3,6	3	2,4	3,6	0,9	1,5

Sumber: World Bank 2024, diolah

Tabel 1.1 di atas menjelaskan dalam sepuluh tahun terakhir tingkat pengangguran di negara-negara ASEAN yang setiap tahunnya berfluktuatif. Terdapat lima (5) negara ASEAN yang memiliki rata-rata tingkat pengangguran tertinggi dibandingkan dengan negara lainnya, yaitu Brunei Darussalam dengan rata-rata tingkat pengangguran sebesar 7,13 persen, Indonesia dengan rata-rata tingkat pengangguran sebesar 4,04 persen, Singapura dengan rata-rata tingkat pengangguran sebesar 3,87 persen, Malaysia dengan rata-rata tingkat pengangguran sebesar 3,48 persen, dan Filipina dengan rata-rata tingkat pengangguran sebesar 2,82 persen, oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan lima negara di ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Filipina.

Pengangguran berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi bukan hanya

berdampak negatifnya terhadap pendapatan nasional dan per kapita, tetapi masalah yang melekat pada masyarakat yang tidak dapat memperoleh kesehatan yang baik, pendidikan yang berkualitas, perumahan yang



layak, makanan yang sehat, air yang baik, dan kebutuhan dasar hidup karena standar hidup yang rendah, kemiskinan, dan pendapatan yang rendah (Godslove & Wobilor, 2016).

Pengeluaran pemerintah merupakan instrumen penting dalam kebijakan sektor publik dalam mengurangi tingkat pengangguran (Vivi Afryani, 2023) Kebijakan fiskal yang mendorong belanja publik merupakan satu-satunya solusi optimal bagi negara-negara berkembang dalam menghadapi lapangan kerja dan menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap sebagian pengangguran. Secara definisi, pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran tahunan oleh pemerintah federal untuk mencapai tujuan ekonomi makro yang antara lain mencakup: penciptaan lapangan kerja, peningkatan output, stabilitas tingkat harga secara umum, dan keseimbangan neraca pembayaran (Bidemi, 2016). Berikut data pengeluaran pemerintah di negara-negara ASEAN dalam 10 tahun terakhir yakni tahun 2013 sampai 2022:

Tabel 1. 2 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah di Negara-Negara ASEAN Tahun 2013-2022 (US\$)

Tahun	Brunei	Indonesia	Malaysia	Filipina	Singapura
2013	6.076.600	174.907.000	91.139.300	50.697.500	33.860.000
2014	5.828.500	165.791.100	89.055.300	51.485.800	40.205.200
2015	5.000.900	150.441.700	74.460.600	54.936.000	44.781.000
2016	4.486.000	156.808.700	69.011.500	59.936.000	49.849.300
2017	4.436.100	168.189.000	70.372.200	62.611.000	47.324.800
2018	4.362.000	173.412.400	81.850.300	72.318.100	52.825.400
2019	4.368.700	183.397.100	86.121.500	81.659.600	52.760.700
2020	3.989.400	197.321.100	95.218.900	95.353.600	86.055.300
2021	4.080.800	216.238.500	88.632.800	105.683.200	75.717.400
2022	4.399.800	231.322.100	103.141.200	104.673.400	69.405. 600

Sumber: IMF dan World Bank 2024, diolah

data dapat dilihat pada **Tabel 1.2** diatas, terlihat bahwa pengeluaran pemerintah yang-masing negara anggota ASEAN bervariasi, dimana pada tahun 2013



pengeluaran pemerintah Indonesia menjadi pengeluaran pemerintah tertinggi yaitu sebesar 174.907,00 juta US\$, Berikutnya Malaysia sebesar 91.139,30 juta US\$, dan Filipina sebesar 50.697,50 juta US\$. Berikutnya yang terendah adalah pengeluaran pemerintah Brunei yaitu sebesar 6.076,60 juta US\$. Kemudian di tahun 2014 Pengeluaran Pemerintah tertinggi kembali negara Indonesia sebesar 165.791,10 juta US\$, terendah juga Brunei sebesar 5.828,50 juta US\$. Demikian selanjutnya negara Indonesia selalu memiliki pengeluaran pemerintah tertinggi dan Brunei Darussalam selalu terendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya.

Pengeluaran pemerintah merupakan alat utama kebijakan fiskal yang dapat digunakan oleh pemerintah mempengaruhi permintaan agregat, yang berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, pendapatan nasional dan distribusinya (El et al., 2018). Pengeluaran pemerintah yang dipergunakan untuk membeli barang dan jasa akan mendorong terciptanya lapangan kerja. Pemerintah dalam upaya menyediakan barang publik secara tidak langsung akan membuka kesempatan kerja. Lapangan kerja yang tersedia akibat dari aktivitas pemerintah akan dipengaruhi oleh jenis pengeluaran. Adapun kebijakan pemerintah dalam usahanya untuk menanggulangi masalah pengangguran melalui kebijakan fiskal, dalam hal ini pengeluaran pemerintah yang ekspansif tampaknya belum mendatangkan hasil yang signifikan, pengeluaran pemerintah yang setiap tahunnya mengalami kenaikan ternyata diiringi pula oleh bertambahnya jumlah pengangguran. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya pengeluaran pemerintah yang tidak tepat sasaran, misalnya selama ini

ran pembangunan lebih banyak ditujukan untuk membiayai proyek-
ang padat modal atau misalnya, untuk merestrukturisasi permodalan



perusahaan-perusahaan konglomerat seperti bank-bank swasta atau juga karena sistem birokrasi pemerintah yang kurang efisien yang menyebabkan terjadinya penyelewengan-penyelewengan serta penyalahgunaan anggaran, sehingga pengeluaran pemerintah menjadi tidak tepat sasaran dan jumlah pengangguran yang setiap tahunnya bertambah.

Di sisi lain, pengeluaran pemerintah adalah kebijakan di mana pemerintah menggunakan program-program pengeluarannya untuk menghasilkan dampak yang diinginkan seperti penyediaan jalan yang baik, fasilitas infrastruktur, dan pengurangan kemiskinan, penyediaan sekolah dan pusat-pusat kesehatan serta penciptaan lapangan kerja dan menghindari dampak yang tidak diinginkan seperti kemiskinan, pelayanan kesehatan yang buruk, pendidikan yang buruk, perumahan yang buruk, makanan yang tidak sehat serta pendapatan yang rendah dan pengangguran. Sebagai implikasinya, program-program pengeluaran pemerintah merupakan faktor yang kuat untuk mengatasi pengangguran dan masalah-masalah yang menyertainya (Abubakar, 2023).

Pada dasarnya, upaya untuk menciptakan lapangan kerja yang diinginkan bagi sumber daya manusia yang berlimpah yang terus bertambah setiap tahunnya selalu menyita perhatian para pembuat kebijakan di berbagai negara di dunia. Hal ini biasanya tercermin dalam dorongan kebijakan mereka, dengan tujuan mendasar untuk mengembangkan lingkungan yang mendukung penciptaan lapangan kerja. Dengan kata lain, lapangan kerja tercipta ketika kesempatan kerja disediakan oleh pemerintah melalui pengeluaran pemerintah dalam penyediaan fasilitas infrastruktur sosial dan ekonomi dalam perekonomian. Hal ini menyiratkan

penyediaan fasilitas infrastruktur melalui dana publik memiliki tujuan ganda untuk menciptakan kesempatan kerja secara langsung dan pada saat yang



sama menggunakan fasilitas tersebut untuk mendorong sektor-sektor produktif dalam rangka memproduksi dan menyediakan kesempatan kerja bagi angkatan kerja. Seperti yang diamati oleh M. L. Jhingan (2003), kelangkaan kesempatan kerja, yang menimbulkan masalah pengangguran, tidak hanya menjadi masalah di negara-negara kurang berkembang tetapi juga di negara-negara maju. Namun demikian, masalah makroekonomi ini lebih terasa di negara-negara berkembang. Kurangnya kesempatan kerja memperburuk situasi pengangguran di mana beberapa orang yang dapat dipekerjakan, dalam angkatan kerja, dengan kualifikasi, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan, bersedia dan ingin bekerja tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan (Adawo, 2012).

Foreign Direct Investment (FDI) merupakan faktor lain yang juga dapat mempengaruhi pengangguran (Pranatika & Satria, 2023). Menurut Krugman & Obstfeld (1991) *Foreign Direct Investment* merupakan aliran modal internasional dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau melakukan ekspansi di negara lain, yang biasanya berupa infrastruktur, peralatan produksi, pembelian tanah untuk kebutuhan produksi dan mesin-mesin baru. Penanaman modal ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja, seperti membuka lapangan kerja baru yang akan menyerap lebih banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Para investor asing ini tertarik menanamkan modalnya di suatu negara karena melihat adanya peluang bisnis yang memberikan keuntungan bagi perusahaan-perusahaan di negaranya. Penelitian oleh Alkofahi (2020) juga menemukan bahwa FDI dan pengangguran menunjukkan hubungan saling berpengaruh di Arab Saudi. Perkembangan FDI di negara-negara ASEAN tahun 2013-2022.



Tabel 1. 3 Perkembangan *Foreign Direct Investment (FDI)* di Negara-Negara ASEAN Tahun 2013-2022 (US\$)

Tahun	Brunei	Indonesia	Malaysia	Filipina	Singapura
2013	775.641.999	23.280.000.000	11.300.000.000	3.740.000.000	64.390.000.000
2014	573.906.208	25.120.000.000	10.620.000.000	5.740.000.000	68.700.000.000
2015	171.289.168	19.780.000.000	9.860.000.000	5.640.000.000	69.770.000.000
2016	150.550.827	4.540.000.000	13.470.000.000	8.280.000.000	65.360.000.000
2017	467.927.550	20.510.000.000	9.370.000.000	10.260.000.000	102.170.000.000
2018	516.202.621	18.910.000.000	8.300.000.000	9.950.000.000	82.010.000.000
2019	373.256.767	24.990.000.000	9.150.000.000	8.670.000.000	105.890.000.000
2020	565.542.275	19.180.000.000	4.060.000.000	6.820.000.000	80.730.000.000
2021	204.749.380	21.120.000.000	20.250.000.000	11.980.000.000	137.270.000.000
2022	292.416.275	24.700.000.000	14.730.000.000	9.940.000.000	148.760.000.000

Sumber: World Bank 2024, diolah

Tabel 1.3 menunjukkan aliran FDI yang masuk ke masing-masing negara ASEAN pada tahun 2013-2022. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa negara Singapura merupakan penampil FDI yang paling besar dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Pada tahun 2013 FDI Singapura sudah mencapai 64.390.000.000 miliar US\$, kemudian jauh di bawahnya yaitu Indonesia 23.280.000.000 miliar US\$, Malaysia sebesar 11.300.000.000 miliar US\$, Filipina sebesar 3.740.000.000 miliar US\$, dan terendah Brunei yaitu sebesar 775.641.999 miliar US\$. Selanjutnya pada tahun 2022 FDI Singapura mencapai 148.760.000.000 miliar US\$. Perkembangan FDI di ASEAN cenderung fluktuatif dengan peningkatan yang kurang signifikan bahkan Brunei Darussalam sempat mengalami pertumbuhan yang minus.

Negara-negara berkembang dalam memproduksi biaya yang dikeluarkan relatif rendah, yang mendorong investor menanamkan modalnya. Selain itu,

langsung asing (FDI) membawa teknologi yang lebih canggih ke negara-negara yang dimana bisnis lokal mengambil teknologi yang digunakan bagi investasi langsung asing dengan cara pengadaan, dan bisnis dalam negeri dapat



mengakses teknologi perusahaan-perusahaan asing dengan mobilitas tenaga kerja pihak ketiga. Dengan demikian, negara berkembang mendorong negara-negara berkembang untuk mengembangkan sumber daya mereka sendiri untuk memperkuat tempat kerja bersama mereka (Hendrawati et al., 2022). Penanaman modal langsung ialah suatu bentuk investasi yang dilakukan oleh warga negara asing ke suatu negara. Instrumen investasinya tidak hanya berupa uang atau modal, tetapi juga berupa tenaga kerja dan teknologi seiring dengan bertambahnya dan berkurangnya investasi asing. Dengan demikian, peningkatan investasi langsung berdampak negatif terhadap pengangguran (Rahmawati, 2020).

Pengangguran yang dipengaruhi oleh daya beli masyarakat menyebabkan adanya hubungan dengan inflasi, karena inflasi mempengaruhi daya beli masyarakat. Inflasi merupakan kenaikan harga-harga secara umum dalam jangka waktu tertentu. Inflasi yang terjadi karena adanya tarikan permintaan (*demand pull*) secara tidak langsung dapat mengurangi jumlah pengangguran. Sesuai dengan hukum permintaan, apabila permintaan akan suatu barang meningkat, maka harga barang itu sendiri akan meningkat dikarenakan terbatasnya ketersediaan barang tersebut. Pada kondisi tersebut produsen akan berusaha memenuhi permintaan pasar dengan meningkatkan kapasitas produksinya. Peningkatan kapasitas produksi ini berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Tingkat pengangguran dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang tinggi. Tingkat inflasi yang tinggi dapat menyebabkan tingkat pengangguran yang tinggi, yang mengimplikasikan bahwa lebih sedikit kesempatan kerja yang akan tercipta atau, dengan kata lain, lebih sedikit tenaga kerja yang akan dipekerjakan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah perlu menerapkan kebijakan makro yang tepat. Mengontrol jumlah uang yang



beredar di masyarakat juga diperlukan untuk mencegah tingkat inflasi yang tinggi. Berikut tingkat inflasi di negara-negara ASEAN 10 tahun terakhir yakni tahun 2013-2022:

Tabel 1. 4 Inflasi di Negara ASEAN Tahun 2013-2022 (persen)

Tahun	Brunei	Indonesia	Malaysia	Filipina	Singapura
2012	0.1	4.3	1.7	3.0	4.6
2013	0.4	6.4	2.1	2.6	2.4
2014	-0.2	6.4	3.1	3.6	1.0
2015	-0.5	6.4	2.1	0.7	-0.5
2016	-0.3	3.5	2.1	1.3	-0.5
2017	-1.3	3.8	3.9	2.9	0.6
2018	1.0	3.2	0.9	5.3	0.4
2019	-0.4	3.0	0.7	2.4	0.6
2020	1.9	1.9	-1.1	2.4	-0.2
2021	1.7	1.6	2.5	3.9	2.3
2022	3.7	4.2	3.4	5.8	6.1

Sumber: World Bank 2024, diolah

Berdasarkan **Tabel 1.4** dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat inflasi tahun 2013-2022 mengalami perbedaan dari tiap negara di ASEAN. Di mana Indonesia sebagai negara yang tercatat memiliki tingkat inflasi yang tinggi dibandingkan negara lain, pada tahun 2012-2022 rata-rata inflasi di Indonesia yaitu sebesar 4,06 persen, diikuti oleh Filipina dengan rata-rata tingkat inflasi sebesar 3,08 persen. Sedangkan Brunei Darussalam yang merupakan negara maju sebagai negara yang memiliki tingkat inflasi yang terendah dengan rata-rata sebesar 0,55 persen.

A.W. Phillips dalam teorinya tentang kurva Phillips menyatakan bahwa inflasi dan tingkat pengangguran yang tinggi memiliki dampak negatif terhadap perekonomian dan stabilitas negara. Jika inflasi tinggi, maka pengangguran akan meningkat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari permintaan agregat, sehingga berlaku teori permintaan, yaitu ketika



permintaan meningkat, harga-harga akan naik yang menyebabkan inflasi. Untuk memenuhi permintaan yang meningkat, produsen meningkatkan kapasitas produksi dengan mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja. Sehingga menyebabkan turunnya tingkat pengangguran (Gertler & Leahy, 2006). Penelitian yang pernah dilakukan oleh Qin (2020) menemukan bahwa inflasi berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap pengangguran di perekonomian Amerika Serikat.

Indikator lain yang mempengaruhi pengangguran adalah jumlah penduduk, setiap tahun pertambahan jumlah penduduk membawa akibat bertambahnya jumlah angkatan kerja dan tentunya akan memberikan makna bahwa jumlah orang yang mencari pekerjaan akan meningkat, seiring dengan itu tenaga kerja juga akan bertambah. Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat kepada perkembangan ekonomi. Penduduk yang semakin bertambah akan menyebabkan kenaikan jumlah angkatan kerja. Namun apabila kenaikan jumlah angkatan kerja ini tidak diimbangi dengan kenaikan jumlah kesempatan kerja maka hal ini akan menimbulkan pengangguran. Berikut jumlah penduduk di negara-negara ASEAN 10 tahun terakhir yakni tahun 2013-2022:



**Tabel 1. 5 Jumlah Penduduk di Negara-Negara ASEAN
Tahun 2013-2022 (Jiwa)**

Tahun	Brunei	Indonesia	Malaysia	Filipina	Singapura
2013	411.702	253.275.918	30.134.807	99.700.107	5.399.162
2014	416.656	256.229.716	30.606.459	101.325.201	5.469.724
2015	421.437	259.091.970	31.068.833	103.031.365	5.535.002
2016	425.994	261.850.182	31.526.418	104.875.266	5.607.283
2017	430.276	264.498.852	31.975.806	106.738.501	5.612.253
2018	434.274	267.066.843	32.399.721	108.568.836	5.638.676
2019	438.048	269.582.878	32.804.020	110.380.804	5.703.569
2020	441.725	271.857.970	33.199.993	112.190.977	5.685.807
2021	445.373	273.753.191	33.573.874	113.880.328	5.453.566
2022	449.002	275.501.339	33.938.221	115.559.009	5.637.022

Sumber: World Bank 2024, diolah

Pada **Tabel 1.5** di atas tingkat jumlah penduduk di 5 negara ASEAN tahun 2013- 2022 jumlah penduduk mengalami peningkatan di setiap tahunnya, hal ini di sebabkan karena bertambahnya angka kelahiran, angka kematian dan juga penduduk migrasi yang menetap disuatu negara. Jumlah penduduk yang terus menerus mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun mengakibatkan tumbuhnya angkatan kerja baru ditiap tahunnya yang mana hal tersebut akan di ikuti dengan meningkatnya persaingan yang tinggi. Angka pertumbuhan penduduk mengalami kenaikan dan penurunan dari waktu ke waktu. Jika dilihat dari tahun tahun 2013 hingga tahun 2022 Indonesia mejadi negara dengan angka penduduk paling tinggi diantara negara ASEAN lainnya. tingkat jumlah penduduk tertinggi jatuh pada periode 2019 sebesar 275.501.339 jiwa di negara Indonesia. Kemudian untuk tingkat jumlah penduduk terendah di 5 negara ASEAN terjadi pada periode 2013 sebesar 5,399,162 jiwa di negara Singapura.



elitian tentang pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi asing (FDI), inflasi, dan jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran di

ASEAN sangat penting dilakukan karena kawasan ini memiliki peran strategis dalam perekonomian global dan dinamika sosial yang beragam. Pengeluaran pemerintah, sebagai instrumen kebijakan fiskal, memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, sehingga analisis mendalam diperlukan untuk memahami sejauh mana dampaknya terhadap pengangguran di berbagai negara ASEAN. Selain itu, FDI merupakan sumber utama modal yang dapat memperkuat sektor-sektor ekonomi domestik dan menciptakan kesempatan kerja baru, namun perlu diteliti lebih lanjut bagaimana aliran FDI ini berdampak pada pengangguran di masing-masing negara. Inflasi juga menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan kestabilan ekonomi, yang pada akhirnya berdampak pada lapangan kerja. Tingkat inflasi yang terlalu tinggi dapat menurunkan daya beli dan mengurangi investasi, yang dapat memicu peningkatan pengangguran. Oleh karena itu, memahami hubungan antara inflasi dan pengangguran menjadi krusial untuk merumuskan kebijakan yang tepat. Adapaun jumlah penduduk, sebagai salah satu variabel demografis, juga memiliki pengaruh signifikan terhadap pasar tenaga kerja. Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat meningkatkan tekanan terhadap pasar tenaga kerja jika tidak diimbangi dengan peningkatan lapangan kerja yang memadai. Di sisi lain, populasi yang besar dapat menjadi sumber tenaga kerja potensial yang mendorong pertumbuhan ekonomi jika dikelola dengan baik.

Berdasarkan data yang ada di atas, maka penelitian ini hadir untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah, FDI, inflasi, dan jumlah penduduk dalam hal mengurangi pengangguran dengan judul “Determinan Tingkat Pengangguran (Studi Kasus 5 Negara ASEAN Tahun 1998-2022)”.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pengangguran di negara-negara ASEAN?
2. Apakah *foreign direct investment* berpengaruh terhadap pengangguran di negara-negara ASEAN?
3. Apakah inflasi berpengaruh terhadap pengangguran di negara-negara ASEAN?
4. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap pengangguran di negara-negara ASEAN?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pengangguran di negara-negara ASEAN
2. Untuk mengetahui pengaruh *foreign direct investment* terhadap pengangguran di negara-negara ASEAN
3. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap pengangguran di negara-negara ASEAN
4. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap pengangguran di negara-negara ASEAN

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ragam penelitian tentang analisis pengaruh pengeluaran pemerintah, *Foreign Direct Investment*, inflasi, dan jumlah penduduk terhadap pengangguran di negara-negara ASEAN serta mampu menambah pengetahuan dan wawasan mengenai analisis tingkat pengangguran di beberapa negara khususnya negara-negara ASEAN.

2. Manfaat Praktis

Dengan mengetahui adanya analisis tingkat pengangguran melalui pengeluaran pemerintah, *Foreign Direct Investment* (FDI), inflasi, dan jumlah penduduk di negara-negara ASEAN, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah dalam membuat dan menentukan kebijakan-kebijakan dalam hal mengurangi pengangguran di negara-negara ASEAN.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Pengangguran

Pengangguran diartikan sebagai angkatan kerja yang belum dan sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terjadi karena jumlah penawaran tenaga kerja lebih besar daripada permintaan tenaga kerja. Dengan kata lain, terjadi surplus penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja. Ketidakseimbangan dan ketidakcocokan antara permintaan lapangan kerja dengan penawaran lapangan kerja inilah yang menciptakan pengangguran (Suhandi et al., 2021). Pengangguran adalah kondisi dimana seseorang yang sudah berusia kerja namun tidak memiliki pendapatan atau tidak bekerja (Devit, 2020). Menurut BPS (2021), dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Pengangguran merupakan masalah makroekonomi yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia secara langsung. Bagi kebanyakan orang kehilangan suatu pekerjaan merupakan penurunan suatu standar kehidupan. Jadi tidak mengejutkan apabila pengangguran menjadi topik yang sering diperbincangkan dalam perdebatan politik oleh para politisi yang seringkali mengkaji bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu terciptanya lapangan pekerjaan (Mankiw, 2000).



Teori Klasik, menjelaskan pandangan bahwa pengangguran dapat dicegah melalui sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas agar dapat menjamin adanya permintaan yang akan menyerap semua penawaran. Menurut pandangan klasik, pengangguran terjadi karena misalokasi sumber daya yang bersifat sementara karena dapat diatasi dengan mekanisme harga (Gilarso, 2003). Jadi dalam teori klasik, apabila terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja, maka upah akan turun dan hal tersebut mengakibatkan produksi perusahaan menjadi turun. Sehingga permintaan akan tenaga kerja akan terus meningkat karena perusahaan mampu melakukan perluasan produksi akibat keuntungan yang diperoleh dari rendahnya biaya. Peningkatan tenaga kerja selanjutnya mampu menyerap kelebihan tenaga kerja yang di pasar, apabila harga relatif stabil (Tohar, 2000).

Menurut Teori Keynes, masalah pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah. Jumlah total permintaan barang dan jasa dalam suatu perekonomian dikenal sebagai permintaan agregat. Sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi, akan tetapi rendahnya konsumsi. Menurut Keynes, hal ini dapat dilimpahkan pada mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja meningkat, upah akan turun hal ini akan mengakibatkan kerugian, karena penurunan upah berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang atau jasa, sehingga produsen akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja. Keynes menganjurkan adanya campur tangan pemerintah dalam mempertahankan tingkat permintaan agregat agar sektor pariwisata dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Pemerintah hanya bertugas untuk



menjaga tingkat permintaan agregat, sementara yang menyediakan lapangan kerja adalah sektor wisata, dengan tujuan untuk mempertahankan pendapatan masyarakat agar daya beli masyarakat dapat terjaga. Sehingga tidak menambah resesi serta diharapkan mampu untuk mengatasi pengangguran akibat resesi (Soesastro, 2005).

A.W. Phillips menggambarkan bagaimana sebaran hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, maka sesuai dengan teori permintaan, jika permintaan naik maka harga akan naik. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (asumsinya tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja maka dengan naiknya harga-harga (inflasi), pengangguran berkurang.

2.1.2 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah sejumlah barang yang dihasilkan sebagai hasil dari keputusan yang diambil pemerintah untuk menawarkan barang dan jasa kepada masyarakat umum. Pengeluaran pemerintah adalah kebijakan di mana pemerintah menggunakan program-program pengeluarannya untuk menghasilkan dampak yang diinginkan seperti penyediaan jalan yang baik, fasilitas infrastruktur, dan pengurangan kemiskinan, penyediaan sekolah dan pusat-pusat kesehatan serta penciptaan lapangan kerja dan menghindari dampak yang tidak diinginkan seperti kemiskinan, pelayanan kesehatan yang buruk, pendidikan yang



buruk, perumahan yang buruk, makanan yang tidak sehat serta pendapatan yang rendah dan pengangguran.

John Maynard Keynes dalam Mankiw (2016) menjelaskan dalam bukunya *The General Theory of Employment, Interest and Money*. Keynes berpendapat bahwa rendahnya permintaan agregat bertanggung jawab atas rendahnya pendapatan dan tingginya pengangguran yang menjadi ciri kemerosotan ekonomi. Permintaan agregat merupakan total permintaan untuk semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian pada tingkat harga dan periode waktu tertentu. Permintaan agregat merupakan salah satu ukuran pendapatan nasional. Dalam perekonomian terbuka, pendapatan nasional didefinisikan sebagai $Y=C+I+G(X-M)$ yaitu pengeluaran konsumsi (C), pengeluaran investasi (I), pengeluaran pemerintah (G) dan ekspor neto (X-M). Secara langsung, pemerintah dapat mempengaruhi pendapatan nasional melalui pengeluaran pemerintah dan secara tidak langsung mempengaruhi pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, dan ekspor impor. Ekonom lainnya, Adolf Wagner, menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan aktivitas pemerintah meningkat seiring berjalannya waktu. Wagner mengukur rasio pengeluaran pemerintah terhadap produk nasional negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang pada abad ke-19. Hasilnya menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah meningkat. Wagner menyebut kecenderungan ini sebagai hukum peran pemerintah yang semakin besar (*the law of ever-increasing Government action*).

Rostow dan Musgrave dalam Mangkoesoebroto (2010) menyampaikan teori berdasarkan pada pandangan mereka melalui



pengamatan terhadap pembangunan ekonomi di beberapa negara. Model ini menghubungkan tahapan pembangunan ekonomi dengan pengeluaran pemerintah yang terdiri dari tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal presentasi investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena harus menyediakan sarana dan prasarana publik. Pada tahap menengah peranan investasi pemerintah dibutuhkan namun investasi swasta semakin besar yang menyebabkan kegagalan pasar dan pada akhirnya membuat pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik lebih banyak dan lebih baik. Pada tahap lanjut, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana untuk aktivitas sosial.

Peacock dan Wiseman dalam Mangkoesoebroto (2010) mengemukakan pendapat lain dalam menerangkan perilaku perkembangan pengeluaran pemerintah. Pemerintah lebih cenderung menaikkan pajak untuk membiayai anggarannya. Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal meningkatnya *Gross National Product* (GNP) akan menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah yang semakin besar. Akibatnya adanya keadaan tertentu yang mengharuskan pemerintah untuk memperbesar pengeluarannya, maka pemerintah memanfaatkan pajak sebagai alternatif untuk peningkatan penerimaan negara. Jika tarif pajak dinaikkan maka pengeluaran investasi dan konsumsi masyarakat menjadi berkurang. Keadaan ini disebut efek pengalihan (*displacement effect*) yaitu adanya suatu gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah.



Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesebroto, 1993). Pengeluaran pemerintah mencerminkan kombinasi produk yang dihasilkan untuk menyediakan barang dan jasa publik kepada masyarakat dan mencakup pilihan berdasarkan keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, belanja pemerintah Indonesia secara garis besar dikelompokkan menjadi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan (Dumairy, 1996).

2.1.3 *Foreign Direct Investment (FDI)*

Foreign Direct Investment (FDI) adalah salah satu komponen kunci dari sistem ekonomi internasional yang terbuka dan efisien, yang berlawanan dengan ekonomi yang diatur secara ketat. FDI adalah investasi langsung yang dilakukan oleh individu atau perusahaan di negara lain ke dalam produksi atau kepentingan bisnis, baik dengan secara langsung mendirikan bisnis atau memperluas operasi bisnis yang sudah ada atau dengan membeli perusahaan di negara sasaran (Johnny et al., 2018). *Foreign direct investment (FDI)* terdiri dari *inward* dan *outward*. *Inward* FDI adalah investasi dari mancanegara ke dalam negeri, sedangkan *outward* FDI merupakan investasi ke negara lain.

Krugman & Obstfeld (1991) menyebutkan bahwa FDI merupakan salah satu bentuk modal internasional yang dimana perusahaan dari sebuah negara mendirikan dan memperluas perusahaannya di negara lain. FDI merupakan salah satu bentuk penanaman modal asing dengan cara mengambil ahli saham atau



menambah modal dalam sebuah perusahaan yang sudah lama ada ataupun perusahaan yang baru. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2007 mengenai penanaman modal, penanaman modal asing (PMA) merupakan suatu kegiatan penanaman modal dalam melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.

Menurut Feldstein (2000) aliran *Foreign Direct Investment* (FDI) memiliki beberapa keuntungan, yaitu: (1) Aliran modal tersebut mengurangi risiko dari kepemilikan modal dengan melakukan deversifikasi melalui investasi; (2) Integrasi global pasar modal dapat memberikan spread terbaik dalam pembentukan corporate governance, accounting rules, dan legalitas; dan (3) Mobilitas modal secara global membatasi kemampuan pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang salah.

2.1.4 Inflasi

“Hubungan paling penting dalam ekonomi makro mungkin adalah kurva Phillips”. Pernyataan ini diungkapkan oleh ekonom Gregory Akerlof pada kuliah yang diberikannya pada saat ia menerima *Nobel Prize* pada tahun 2001. Kurva Phillips adalah hubungan jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Pada tahun 1958, ekonom yang bernama A.W. Phillips menerbitkan sebuah artikel pada jurnal Inggris “*Economica*”. Artikel tersebut berjudul “*The Relationship between Unemployment and the Rate of Change* Money Wages in the United Kingdom 1861-1957”. Dalam artikel tersebut, Phillips menunjukkan korelasi negatif antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi. Dengan kata lain, Phillips menunjukkan bahwa tahun-tahun



dengan tingkat pengangguran yang rendah cenderung memiliki tingkat inflasi yang tinggi, sedangkan tahun-tahun dengan pengangguran yang tinggi cenderung memiliki inflasi rendah (Mankiw, 2000). A.W. Phillips menggambarkan bagaimana sebaran hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, maka sesuai dengan teori permintaan, jika permintaan naik maka harga akan naik. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (asumsinya tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja maka dengan naiknya harga-harga (inflasi), pengangguran berkurang.

Menurut teori Klasik, faktor kunci dalam inflasi adalah jumlah uang beredar yang sesuai dengan teori kuantitas uang, kenaikan jumlah uang beredar dapat menaikkan tingkat harga umum. Namun, dalam teori pendapatan modern, pengaruh permintaan diartikan sebagai kelebihan permintaan uang agregat relatif terhadap tingkat output *full employment* perekonomian. Teori ini mengasumsikan bahwa harga barang dan jasa serta sumber daya ekonomi responsif terhadap kekuatan penawaran dan permintaan sehingga, akan bergerak naik dengan mudah di bawah tekanan permintaan agregat yang tinggi. Para ekonom seperti Friedman, Hawtrey, Golden Weiser, yang menganggap inflasi sebagai fenomena moneter murni, sangat mendukung teori inflasi yang disebabkan oleh kelebihan jumlah uang beredar. Kelebihan permintaan dalam perekonomian terjadi karena adanya



pengeluaran investasi berskala besar, baik di sektor publik maupun di sektor swasta, sehingga melebihi total output. Sebagai akibat dari kelebihan permintaan ini, harga-harga akan naik dan terjadilah *excess demand inflation* atau *demand-pull inflation*.

Menurut Keynes dalam Mankiw (2016) inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonomisnya, sehingga menyebabkan permintaan efektif masyarakat terhadap barang-barang (permintaan agregat) melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (penawaran agregat), akibatnya akan terjadi *inflationary gap*. Keterbatasan jumlah persediaan barang (penawaran agregat) ini terjadi karena dalam jangka pendek kapasitas produksi tidak dapat dikembangkan untuk mengimbangi kenaikan permintaan agregat. Oleh karenanya sama seperti pandangan kaum monetarist, Keynesian models ini lebih banyak dipakai untuk menerangkan fenomena inflasi dalam jangka pendek. Dengan keadaan daya beli antara golongan yang ada di masyarakat tidak sama (heretogen), maka selanjutnya akan terjadi realokasi barang-barang yang tersedia dari golongan masyarakat yang memiliki daya beli yang relatif rendah kepada golongan masyarakat yang memiliki daya beli yang lebih besar. Kejadian ini akan terus terjadi di masyarakat. Sehingga, laju inflasi akan berhenti hanya apabila salah satu golongan masyarakat tidak bisa lagi memperoleh dana (tidak lagi memiliki daya beli) untuk membiayai pembelian barang pada tingkat harga yang berlaku, sehingga permintaan efektif masyarakat secara keseluruhan tidak lagi melebihi supply barang (*inflationary gap* menghilang).



2.1.5 Jumlah Penduduk

Thomas Robert Malthus dalam skuosen (2009: 85) menyoroti hubungan pertumbuhan ekonomi dan penambahan penduduk. Ekonomi hanya akan tumbuh dalam jangka panjang jika penambahan penduduk lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi. Menurut Malthus, penambahan penduduk berdasarkan deret ukur, sementara pertumbuhan pangan berdasarkan deret hitung yang akan menyebabkan pada masa datang cenderung mengalami kekurangan pangan. Malthus menjelaskan kecenderungan umum penduduk suatu negara untuk tumbuh menurut deret ukur yaitu dua-kali lipat setiap 30-40 tahun. Sementara itu saat yang sama, karena hasil yang menurun dari faktor produksi tanah, persediaan pangan hanya tumbuh menurut deret hitung. Oleh karena pertumbuhan persediaan pangan tidak bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan tinggi, maka pendapatan perkapita (dalam masyarakat tani didefinisikan sebagai produksi pangan perkapita) akan cenderung turun menjadi sangat rendah, yang menyebabkan jumlah penduduk tidak pernah stabil, atau hanya sedikit di atas tingkat subsisten yaitu pendapatan yang hanya dapat untuk memenuhi kebutuhan sekedar untuk hidup.

Menurut Model Solow, besar kecilnya tingkat pengangguran dipengaruhi oleh pertumbuhan populasi. Menurut konsep ini, negara yang mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat akan memiliki pendapatan dan modal yang lebih rendah per pekerja. Oleh karena itu, penambahan penduduk yang cepat diperkirakan akan menyebabkan rendahnya PDB per kapita negara. Dengan kata lain, PDB yang rendah akan mengakibatkan pengangguran karena efek ketenagakerjaan.



Todaro (2014), menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja (yang terjadi beberapa tahun kemudian setelah pertumbuhan penduduk) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jumlah angkatan kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya. Dengan kata lain, semakin banyak angkatan kerja yang digunakan dalam proses produksi maka output hasil produksi akan mengalami peningkatan sampai batas tertentu.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Pengangguran

Pengaruh antara pengeluaran pemerintah dengan pengangguran dijelaskan dalam Teori Keynes, bahwa apabila pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan dan pajak menurun, maka akan ada suatu suntikan yang masuk dalam pendapatan nasional sehingga permintaan agregat juga mengalami kenaikan dan memberikan efek yaitu lapangan pekerjaan meningkat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan yang negatif antara pengeluaran pemerintah dengan tingkat pengangguran, yaitu ketika pengeluaran pemerintah naik maka penyerapan tenaga kerja juga naik sehingga angka pengangguran turun.

Keynes percaya bahwa pengangguran tidak bertentangan dengan keseimbangan. Keseimbangan ekonomi dapat dicapai pada tingkat makro dan keseimbangan ini disertai dengan adanya pengangguran dalam



angkatan kerja. Pengangguran tersebut mungkin akan menghancurkan, namun pemerintah dapat, melalui kebijakan fiskal ekspansif yang besar yang mengarah pada resesi, melalui peran penting dan pengaruh kebijakan fiskal, yaitu pengeluaran dan pengganda pajak produksi dalam meningkatkan produksi dan menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah memiliki korelasi terbalik dengan pengangguran. Semakin tinggi pengeluaran pemerintah, semakin banyak kesempatan kerja dan semakin sedikit tingkat pengangguran. Pengeluaran pemerintah memiliki korelasi terbalik dengan pengangguran. Semakin tinggi pengeluaran pemerintah, semakin banyak kesempatan kerja dan semakin sedikit tingkat pengangguran (Hammad et al., 2023b).

2.2.2 Hubungan *Foreign Direct Investment* (FDI) dengan Pengangguran

Investasi memiliki peran penting dalam mendorong aktivitas ekonomi dan menciptakan peluang kerja bagi masyarakat. Melalui investasi, masyarakat dapat terus meningkatkan kegiatan ekonomi, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan mereka. Investasi asing juga memberikan dampak positif, seperti pembangunan infrastruktur negara, pendirian dan pengembangan industri, serta pemanfaatan sumber daya baru. Hal ini cenderung berkontribusi pada peningkatan lapangan kerja baru yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.



Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri & Ash Shidiqie (2023), jika iklim investasi suatu negara baik maka hal tersebut akan menarik perhatian para investor untuk menanamkan modalnya. Semakin banyak

investor yang menanamkan modalnya maka akan semakin banyak industri-industri didirikan dan dapat menyerap sumber daya manusia.

2.2.3 Hubungan Inflasi dengan Pengangguran

Keterkaitan atau hubungan antara inflasi dan pengangguran dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva Phillips. Hubungan antara inflasi dan pengangguran dalam kerangka Kurva Phillips yakni tingkat pengangguran yang rendah akan menyebabkan kenaikan upah pekerja, sebagai respons dari tingkat upah yang lebih tinggi, pengusaha akan menaikkan harga untuk menutupi kenaikan biaya produksi. Karena harga-harga secara umum telah meningkat, pekerja akan meminta kenaikan upah dari pengusaha. Kondisi ini terus berlanjut dan menyebabkan inflasi dan juga kenaikan upah pekerja. Hubungan negatif antara pengangguran dan inflasi juga dapat dilihat dari cara penanganannya. Ketika suatu negara mengalami inflasi yang tinggi, salah satu langkah strategis yang dilakukan untuk mengatasi laju inflasi adalah dengan melakukan kebijakan moneter ketat. Hal ini dilakukan dengan cara menaikkan tingkat suku bunga. Kelanjutan dari kenaikan suku bunga adalah penurunan investasi yang akan berdampak pada kenaikan tingkat pengangguran. Pallis (2006) melakukan penelitian terkait kurva Philips mengenai inflasi dan tingkat pengangguran di negara-negara anggota Uni Eropa. Pallis mengungkapkan bahwa durasi hubungan antara inflasi dan tingkat pengangguran akan berbeda secara signifikan antar negara. Perekonomian negara juga mempengaruhi hubungan ini. Namun, kedua

di mengenai kurva Philips menunjukkan bahwa inflasi akan berdampak negatif terhadap tingkat pengangguran.



2.2.4 Hubungan Jumlah Penduduk dengan Pengangguran

Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong bahkan penghambat suatu pertumbuhan ekonomi. Disisi lain pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor penghambat. Dalam hal ini jumlah penduduk akan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi apabila tidak terserap oleh unit usaha atau dunia kerja yang mengakibatkan seseorang mejadi pengangguran. Oleh karena itu ketika jumlah penduduk bertambah dengan tidak diiringinya penambahan lapangan pekerjaan maka akan menambah angka pengangguran baru yang menyebabkan beban dalam perekonomian suatu daerah.

Jika jumlah penduduk suatu wilayah mengalami kenaikan maka jumlah angkatan kerja akan ikut naik, akibatnya kesempatan kerja akan semakin berkurang dikarenakan terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Sebagian angkatan kerja yang belum atau tidak mendapatkan kesempatan kerja akhirnya berdampak pada jumlah pengangguran yang meningkat. Disisi lain, jumlah penduduk yang banyak jika disertai dengan kemampuan dan usaha dapat menimbulkan produktivitas dan membuka lapangan kerja baru, maka nantinya banyak angkatan kerja berkesempatan lebih tinggi untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai minat dan bakat sehingga jumlah pengangguran akan semakin berkurang.

2.3 Tinjauan Empiris

Penelitian yang dilakukan oleh Selase (2019) tentang dampak pengeluaran terhadap tingkat pengangguran di beberapa negara di Afrika. Penelitian ini menggunakan *Generalized Method of Moments* (GMM) sebagai analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja infrastruktur dan pendidikan



mengurangi tingkat pengangguran, sementara peningkatan belanja pertahanan dan kesehatan meningkatkan pengangguran baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hubungan positif antara belanja kesehatan dan pengangguran disebabkan oleh kesalahan pengelolaan dana pemerintah akibat korupsi. Dampak positif dari belanja pertahanan terhadap pengangguran berkaitan dengan tingginya tingkat ketidakamanan dan kejahatan di wilayah tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahmood dan Khalid (2013), yang mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran di Pakistan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pengeluaran non-pembangunan, karena sebagian besar pengeluaran pemerintah diarahkan untuk perang melawan terorisme, pertahanan dan pengeluaran politik.

Penelitian yang dilakukan oleh Salsabilla & Kusuma (2023) mengenai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan banyaknya pengangguran di suatu negara, khususnya di 6 negara Kawasan ASEAN tahun 2002-2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yaitu menggunakan analisis regresi data panel. Berdasarkan hasil penelitian yang berpengaruh positif yaitu variabel jumlah penduduk dan inflasi. Sedangkan yang berpengaruh negatif yaitu pada variabel produk domestik bruto dan penanaman modal asing.

Sari (2023) yang meneliti terkait determinan tingkat pengangguran negara berkembang di ASEAN tahun 2017-2021. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh inflasi, angkatan kerja, penanaman modal asing, jumlah penduduk, dan

domestik bruto terhadap tingkat pengangguran. Penelitian ini akan regresi data panel dengan Eviews 10. Hasil penelitian menunjukkan produk domestik bruto memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap



tingkat pengangguran. Kemudian variabel inflasi dan angkatan kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran. Variabel jumlah penduduk dan penanaman modal asing berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran di Negara berkembang ASEAN.

C. Onuoha & Agbede (2019) meneliti terkait dampak pengeluaran publik terhadap tingkat pengangguran di negara-negara Afrika tahun 2000-2017. Penelitian ini menggunakan teknik *Generalized Method of Moments* (GMM) untuk analisis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja infrastruktur dan pendidikan mengurangi tingkat pengangguran, sedangkan belanja pertahanan dan kesehatan meningkatkan tingkat pengangguran di wilayah tersebut. Implikasi kebijakannya adalah, hubungan positif antara pengeluaran untuk kesehatan dan pengangguran dapat disebabkan oleh kesalahan pengelolaan dana pemerintah akibat korupsi, sedangkan hubungan positif antara pengeluaran untuk kesehatan dan pengangguran dapat disebabkan oleh tingginya tingkat ketidakamanan dan kejahatan di wilayah tersebut.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Johnny et al. (2018) tentang dampak investasi asing langsung (FDI) terhadap pengangguran di Nigeria pada tahun 1980-2015. Penelitian ini menggunakan dua variabel penjelas (investasi asing langsung dan pembentukan modal) dan satu variabel yang dijelaskan (tingkat pengangguran). Penelitian ini dilakukan menggunakan model regresi linear dan uji kausalitas granger. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif dan tidak signifikan antara investasi asing langsung dan tingkat

angguran di Nigeria, terdapat hubungan positif dan signifikan antara pembentukan modal dan tingkat pengangguran di Nigeria. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Atilaw Woldetensaye et al. (2022) menemukan



bahwa pengaruh investasi asing langsung terhadap pengangguran di negara-negara anggota IGAD Afrika Timur dari tahun 1996 - 2021 dengan menggunakan hukum Okun. Studi ini mengungkapkan bahwa investasi asing langsung berdampak negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran tahunan dan pertumbuhan populasi serta ekspansi ekonomi di negara-negara tuan rumah.

2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, maka penulis menyusun kerangka konseptual dengan variabel independen ialah pengeluaran pemerintah (X1), FDI (X2), inflasi (X3), dan jumlah penduduk (X4) sedangkan variabel dependen pengangguran (Y1) di negara-negara ASEAN.

Menurut pandangan Keynesian, pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran melalui konsep pengeluaran agregat dalam perekonomian. Keynes menekankan pentingnya permintaan agregat dalam menentukan tingkat aktivitas ekonomi dan tingkat pengangguran. Keynes mengajukan konsep multiplier, yang menyatakan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah dapat menyebabkan peningkatan yang lebih besar dalam pendapatan dan output secara keseluruhan dalam perekonomian. Ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran rutinnya, seperti pembelian barang dan jasa atau pembayaran gaji pegawai negeri, hal ini menciptakan pendapatan tambahan bagi rumah tangga dan perusahaan. Pendapatan tambahan ini kemudian dapat digunakan untuk meningkatkan konsumsi dan investasi, yang pada gilirannya menciptakan permintaan tambahan untuk barang dan jasa serta

tan produksi sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran.



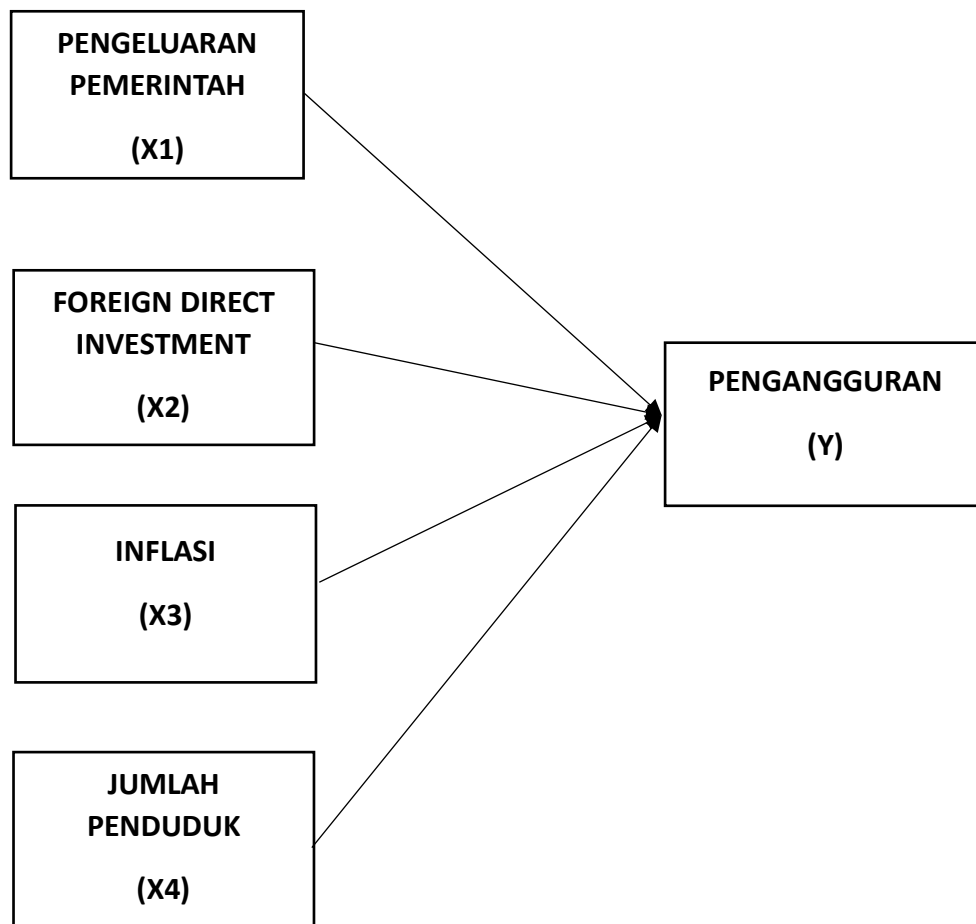
Keynes juga mengajukan konsep multiplier, yang menyatakan bahwa peningkatan pengeluaran, dapat menyebabkan peningkatan yang lebih besar dalam pendapatan dan output ekonomi secara keseluruhan. Ketika pemerintah melakukan investasi dalam pembangunan, pendapatan tambahan yang dihasilkan dapat memicu efek bergulir di seluruh perekonomian. Pendapatan tambahan tersebut meningkatkan permintaan akan barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat menciptakan lebih banyak pekerjaan di berbagai sektor ekonomi, termasuk yang tidak langsung terkait dengan pembangunan itu sendiri.

FDI dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi melalui peningkatan investasi, produksi, dan ekspor, yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran. Tingginya FDI dapat menciptakan lapangan kerja baru sehingga FDI dapat mengatasi masalah pengangguran.

Inflasi merupakan proses kenaikan pada harga-harga barang secara umum, maka tingginya tingkat inflasi akan berakibat pada peningkatan tingkat bunga pinjaman. Oleh karena itu, dengan tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi investasi untuk mengembangkan sektor-sektor yang produktif. Hal ini akan mendorong jumlah pengangguran yang tinggi karena rendahnya kesempatan kerja.

Jumlah penduduk yang besar sering kali berarti penawaran tenaga kerja yang besar. Jika jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia, maka pengangguran akan meningkat.





Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Penelitian

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual penelitian yang telah dijelaskan dan digambarkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Diduga pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap pengangguran di negara-negara ASEAN.
2. Diduga *Foreign Direct Investment* berpengaruh negatif terhadap pengangguran di negara-negara ASEAN.

3. Diduga inflasi berpengaruh negatif terhadap pengangguran di negara-negara ASEAN.



4. Diduga jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pengangguran di negara-negara ASEAN.

